

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35
TAHUN 2010 TENTANG PENGHARGAAN PEMBERIAN
SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL KOTA PALEMBANG
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

MUHAMMAD ROBBY BADILLA
NIM.07011381419175

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Palembang
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
35 TAHUN 2010 TENTANG PENGHARGAAN
PEMBERIAN SATYALANCANA KARYA
SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

MUHAMMAD ROBBY BADILLA
0701138141519175

Telah diijetujui oleh Dosen Pembimbing,

2019

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001



Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP.196911191998032001



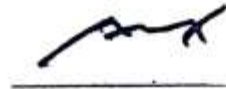
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penghargaan Pemberian Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang*" Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Pada tanggal 24 April 2019

Palembang, 24 April 2019

Ketua

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Anggota

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001




2. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002




3. Sofyan Effendi, S.Ip., M.Si
NIP. 197705122003121003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Kiyagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Administrasi Publik


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Pernyataan Orisinalias Skripsi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Robby Badilla

NIM : 07011381419175

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Angkatan : 2014

Dengan ini menyatakan benar Skripsi yang saya buat merupakan Karya Ilmiah Original saya sendiri, Tanpa Mengcopy atau Menduplicate Skripsi Orang Lain, Demikian Pernyataan saya ini, saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa Ada Paksaan dari Pihak manapun.

Palembang, 2 November 2019
Hormat Saya,

Muhammad Robby Badilla
NIM. 07011381419175

Halaman Persembahan

Moto

*Kesuksesan itu tidak dilihat dari cepat Atau lambat
Seseorang itu lulus
Akan tetapi kesuksen itu datang Dari seseorang yang mau
Berusaha Walau sering diterpa kegagalan*

Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya:
“Kapan Skripsimu selesai”

Taklupa saya bingkiskan ucapan terimakasih untuk:

Orang tua saya, yang selalu mensupport anak-anaknya untuk terus maju tanpa melihat kebelakang.

Saudara-saudara saya, yang selalu mendukung dan membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

Dan terimakasih untuk My Lovely ♥ Ayu Oktariasari yang selalu terus mendorong dan membantu saya agar menyelesaikan skripsi yang telah dikerjakan ini.

Setiap usaha yang dijalankan pasti akan ada hasil yang memuaskan

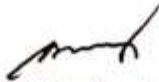
**IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 35
OF 2010 REGARDING DEGREE, SIGNS OF SERVICE AND SIGNS
OF HONOR IN THE STUDY OF GIVING SATYALANCANA
KARYA SATYA FOR CIVIL STATE EMPLOYEES
IN PALEMBANG CITY**

ABSTRACT

This study aims to find of how the implementation of policy about the provision of satyalancana karya satya in the field whether it is suitable with the current regulations, and to know the factors that cause at least the satyalancana and the time in giving satyalancana karya satya to civil servants Palembang. This study uses Adam Smith's theory that sees a bottom-up policy. In Smith's theory there are four main variables, namely, idealized policy, target group, implementing organization, and environmental factors. The results of the study based on the data obtain when conducting interviews using four main variables of smith's theory to get results on the idealized policy variable has not gone well, there are many shortcomings between agencies in carrying out policies that should be run based on applicable regulations.

Keyword: Implementation, Adam Smith, Bottom-up, Idealized policy.

Pembimbing 1



Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001

Pembimbing 2



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP.196911191998032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

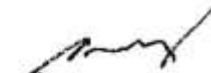
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
35 TAHUN 2010 TENTANG GELAR, TANDA JASA DAN TANDA
KEHORMATAN STUDI PEMBERIAN SATYALANCANA
KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA PALEMBANG**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tentang pemberian satyalancana karya satya ini dilapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, serta mengetahui faktor-faktor penyebab sedikitnya pengusulan satyalancana dan waktu terbit usulan yang memakan waktu yang lama dalam pemberian satyalancana karya satya untuk PNS kota Palembang. Penelitian ini menggunakan teori Adam Smith yang melihat suatu kebijakan dari *bottom-up*. Dalam teori Smith terdapat empat variable utama yaitu, *idealized policy*, *target group*, *implementing organization*, dan *environmental factors*. Hasil penelitian berdasarkan data yang didapat saat melakukan wawancara menggunakan empat variable utama dari teori Smith mendapatkan hasil pada variable *Idealized policy* belum berjalan dengan baik, banyak terdapat kekurangan antar instansi dalam menjalankan kebijakan yang semestinya di jalankan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata kunci : Implementasi, Adam Smith, *bottom-up* , *Idealized policy*.

Pembimbing 1



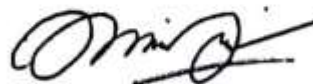
Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001

Pembimbing 2



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP.196911191998032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga, penelitian ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk diteruskan menjadi skripsi sebagai proses akhir dalam menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam rangka melengkapi kesempurnaan dari penulisan proposal ini diharapkan adanya saran dan kritik yang diberikan yang bersifat membangun.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Drs. Mardianto, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan penulisan skripsi ini.
5. Ermanovida, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan penulisan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doanya yang ikhlas dan tulus serta kasih sayang, motivasi dan semangat serta dukungan penuh dalam skripsi penelitian ini.

7. Para Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Civitas Akademika Universitas Sriwijaya.
8. Rekan Mahasiswa/i Program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2014,
9. Seluruh pihak yang telah membantu dan namanya tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan, dukungan dan motivasinya.

Palembang, Maret 2019

Muhammad Robby Badilla
NIM. 07011381419175

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Persembahan	iv
<i>Abstract</i>	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Praktis.....	9
1.4.2 Manfaat Teoritis	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Kebijakan Publik.....	10
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik	13
2.2 Model Implementasi Kebijakan	17
2.3 Skema Kerangka Pemikiran.....	18
2.4 Penelitian Terdahulu	19
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian	23
3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.4 Informan Penelitian	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
3.7 Jadwal Penelitian	33
3.8 Sistematika Penulisan	34

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum.....	35
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	35
4.1.2 Gambaran Umum Kota Palembang	44
4.1.3 Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palembang	50
4.1.3.1 Sejarah Instansi	50
4.1.3.2 Visi, Misi, Moto, Kebijakan Mutu, dan Budaya Kerja BKPSDM Kota Palembang.....	54
4.1.3.3 Stuktur Organisasi Badan Kepegawaian dan PSDM .	56
4.2 Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas Pokok.....	57
4.2.1 Kedudukan	57
4.2.2 Susunan Organisasi	57
4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi	58
4.3 Hasil Pembahasan	68
4.3.1 <i>Idealized Policy</i>	69
4.3.2 <i>Target Group</i>	72
4.3.3 <i>Implementing Organization</i>	75
4.3.4 <i>Enviromental Factor</i>	77
4.4 Matrix Hasil Penelitian	80
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah PNS Kota Palembang.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Penerima Satyalancana Karya Satya yang Diusulkan dan yang Diterbitkan tahun 2016	6
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Penerima Satyalancana Karya Satya yang Diusulkan dan yang Diterbitkan tahun 2017	7
Tabel 4.1 Jumlah Pengusul Satyalancana Karya Satya	76
Tabel 4.2 Jumlah PNS yang tidak Menggusul Satyalancana Karya Satya.....	76
Tabel 4.3 Jumlah Sumber Daya Manusia Bidang Pembinaan Perizinan dan Penilaian Kinerja Aparatur	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Pengusulan dan Penerbitan Satyalancana Karya Satya....	17
Gambar 4.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan	23
Gambar 4.2 Lambang Sumatera Selatan	26
Gambar 4.3 Lambang Kota Palembang.....	43
Gambar 4.4 Visi Misi BKPSDM Kota Palembang dan Skema Alur Pelayanan.....	45
Gambar 4.5 Struktur Organisasi	45
Gambar 4.6 Pimpinan Kepala BKPSDM Kota Palembang.....	55
Gambar 4.7 Alur Proses Komunikasi dan Koordinasi	56
Gambar 4.8 Alur Proses Pengusulan dan Penerbitan	61
Gambar 4.9 Alur Proses Pengusulan dan Penerbitan	66
Gambar 4.10 SOP Pengusulan Satyalancana Karya Satya.....	67
Gambar 4.11 Ruang Pelayanan BKPSDM Kota Palembang	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat-Surat yang Berkaitan dengan Penelitian

Lampiran 2 Foto

Lampiran 3 Peraturan yang Berlaku

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan menentukan. Berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur negara karena pegawai negeri merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunann nasional. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri .

Dalam rangka mencapai tujuan nasional di atas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Untuk mewujudkan pegawai negeri sebagaimana tersebut di atas maka perlu adanya pembinaan dengan sebaik – baiknya atas dasar system karier dan system prestasi kerja.

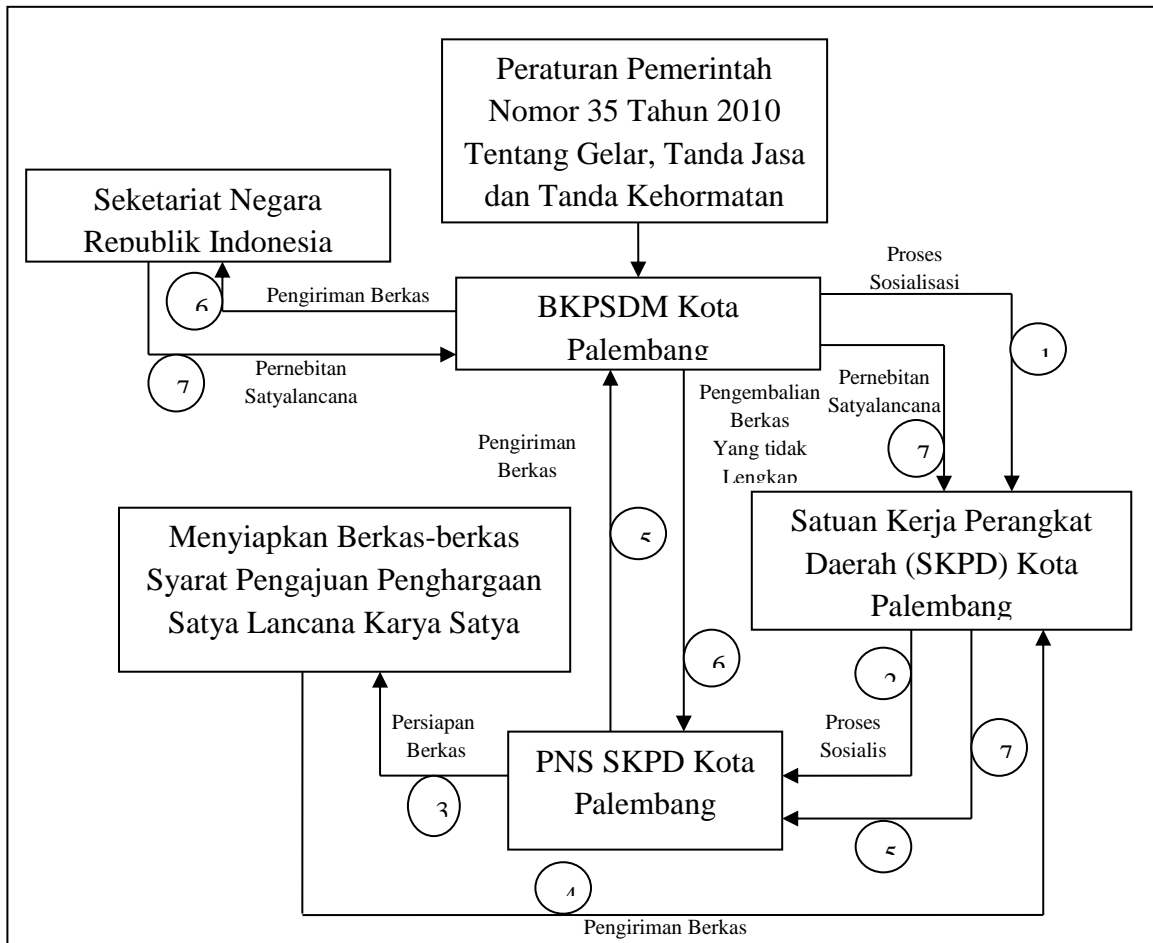
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki etos kerja yang tinggi pada umumnya memiliki sikap mental dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan yang diwujudkan sebagai perilaku kerja seperti tepat waktu, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, rasional dan jujur.

Sebagaimana telah diamanatkan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 Bab IV huruf ke 3 tentang Aparatur Negara bahwa, dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan system karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Negara, maka kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa dapat diberikan penghargaan.

Selain itu juga bila dihubungkan dengan pendapat *David C. Mc. Clillan*, bahwa setiap manusia memiliki motif berprestasi (*achievement motive*), yakni keinginan untuk berkarya yang lebih baik, maka sangat wajar bila seorang PNS juga ingin meningkatkan prestasi kerja yang pada akhirnya mendapat penghargaan dari pimpinannya. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat pujian, penghargaan yang berupa materil, dan lain-lain.

Satyalancana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. Akan tetapi dalam pemberian Satyalancana ini sendiri terutama di Kota Palembang sering

terjadi masalah seperti antara jumlah pengusul dan jumlah penerima Satyalancana Karya Satya ini berubah, ini disebabkan dikarenakan pada saat berkas pengusul masuk ke Sekretariat Negara berkas pengusul Satyalancana Karya Satya ini tidak memenuhi syarat yang harus dimiliki oleh pengusul Satyalancana Karya Satya, hal ini yang menyebabkan tidak terbitnya Satyalancana Karya Satya padahal sebelum berkas persyaratan pengusul dikirim ke pemerintahan pusat, pemerintahan daerah terlebih dahulu memeriksa berkas yang tidak memenuhi syarat berikut alur pengusulan Satyalancana Karya Satya di Kota Palembang.



Sumber: BKPSDM Kota Palembang

Gambar 1.1 Alur Pengusulan dan Penerbitan Satyalancana Karya Satya

Antara waktu pengusulan dan penerbitan Satyalancana Karya Satya yang terlalu lama, dalam Surat Keputusan Sekretariat Militer Presiden/GT.00.03/12/2015 tentang Prosedur Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Bahwa penerbitan Satyalancana Karya Satya ditebitkan 3 (tiga) bulan setelah diusulkan, akan tetapi yang terjadi di lapangan proses penerbitan Satyalancana Karya Satya ini memakan waktu 5 (lima) bulan setelah diusulkan.

Di Kota Palembang Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif Per-1 November di Kota Palembang sendiri berjumlah 12518 Pegawai yang tersebar di seluruh SKPD Kota Palembang. Dari jumlah pegawai tersebut dibagi atas masa pengabdianya yaitu sebagai berikut.

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang
Per- 1 November 2017**

Lama Tahun Pengabdian	Jumlah
<10 Tahun	6139 Pegawai
10-19 Tahun	1666 Pegawai
20-29 Tahun	2902 Pegawai
30> Tahun	1811 Pegawai
Jumlah	12518 Pegawai

Tabel 1.1 Jumlah PNS Kota Palembang

Dari Table 1.1 dapat diketahui bawah jumlah pegawai yang dilihat dari masa pengabdianya, bahwa masa pengabdian di bawah 10 tahun merupakan yang terbanyak akan tetapi untuk mengajukan pembuatan Satyalancana Karya Satya pegawai harus memiliki masa pengabdian diatas 10 tahun dan jumlah pegawai yang berada di atas 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun berjumlah 6379 pegawai dari jumlah

tersebut Pegawai Negeri Sipil bisa untuk mengajukan pembuatan gelar kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Penghargaan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun, baru akan dapat diberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Selain persyaratan masa pengabdian terdapat juga persyaratan yang wajib dilakukan pegawai untuk mengajukan pembuatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana telah diatur dan terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Untuk pengusulan pembuatan Satyalancana Karya Satya dikota PNS di Kota Palembang mengusulkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang, sebelum mengusulkan ke BKPSDM Pegawai juga harus melewati pemeriksaan persyaratan di SKPD masing-masing, selanjutnya Pegawai mengajukan ke BKPSDM Kota Palembang.

Namun Jumlah pengusulan Pembuatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil setiap SKPD Dikota Palembang , Per-tahun 2016 berbanding jauh dengan jumlah PNS yang telah memenuhi syarat kualifikasi jenjang masa pengabdian nya hal ini didasarkan atas beberapa masalah mulai dari proses

pengusulan dan penerbitan yang lama, berikut jumlah pengusul Satyalancana Karya Satya Per-November 2016 dan Terbit Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

**Jumlah Pegawai Penerima Satyalancana Karya Satya
Yang Diusulkan dan Diterbitkan Tahun 2016**

NO	SKPD Kota Palembang	Satyalancana Karya Satya yang Diusulkan			Satyalancana Karya Satya yang Diterbitkan		
		X	XX	XXX	X	XX	XXX
1	Dinas Perhubungan	3	-	1	3	-	1
2	Sekretariat Daerah	-	2	1	-	2	1
3	Dinas Pendidikan	127	45	30	121	39	29
4	Dinas LH dan KK	1	-	-	1	-	-
5	BPPD	-	-	2	-	-	2
6	Inspektorat	1	-	-	1	-	-
7	BPMPTSP	1	1	-	1	1	-
8	Kec. Sukarami	1	-	-	1	-	-
9	DPKA	7	2	4	2	1	3
10	BAKESBANGPOL	1	-	-	-	-	-
11	Sat-Pol PP	-	1	-	-	-	-
JUMLAH		142	51	38	130	43	36

Sumber: BKPSDM Kota Palembang

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Penerima Satyalancana Karya Satya Yang Diusulkan dan yang Diterbitkan

Dari Tabel 1.2 jumlah pengusul pembuatan Satyalancana Karya Satya pada November 2016 hanya terdapat 232 PNS dari 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang saja. Sedangkan pada table 1.1 jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengajukan pembuatan Satyalancana Karya Satya sebanyak 6379 Pegawai dari 52 SKPD Kota Palembang.

Sedangkan untuk pengajuan yang di terima Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang, Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang yang mengajukan Pembuatan Satyalancana Karya Satya 10

(sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun, per Februari – Oktober tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah PNS yang mengusulkan akan tetapi jumlah SKPD Kota Palembang yang terlibat malah berkurang berikut table pengusulan dan penerbitan Satyalancana Karya Satya:

**Jumlah Pegawai Penerima Satyalancana Karya Satya
Yang Diusulkan dan Diterbitkan Tahun 2017**

No	SKPD Kota Palembang	Satyalancana Karya Satya yang Diusulkan			Satyalancana Karya Satya yang Diterbitkan		
		X	XX	XXX	X	XX	XXX
1	Sekretariat Daerah	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat KPU	1	-	1	-	-	1
3	Dinas Kesehatan	-	-	1	-	-	1
4	Dinas Pendidikan	176	84	30	170	83	28
5	Dinas LH dan KK	1	1	3	1	1	3
6	Dinas Perhubungan	1	-	-	1	-	-
7	Sat-Pol PP	-	1	-	-	-	-
8	BKPSDM	1	1	-	1	1	-
9	Kec. Sukarami	-	1	-	-	1	-
		181	88	36	173	86	34

Sumber: BKPSDM Kota Palembang

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Penerima Satyalancana Karya Satya Yang Diusulkan dan yang Diterbitkan

Dari Tabel 1.3 jumlah pengusul pembuatan Satyalancana Karya Satya pada bulan Februari 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016 (table 1.2). Akan tetapi jumlah SKPD Kota Palembang yang terlibat hanya 9 SKPD dari 52 SKPD dengan jumlah 304 pegawai yang mengusulkan namun jumlah tersebut hanya 5% dari jumlah PNS Kota Palembang yang layak menerima Satyalancana Karya Satya.

Dari Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa antara jumlah pengusul dengan jumlah PNS yang ada sangat sedikit yang mengusulkan dari dan SKPD yang terlibat hanya 15 SKPD Kota Palembang dari 52 SKPD yang ada,

Dari latar belakang tersebut yang melatar belakangi peneliti mengambil judul riset ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pengusul Satyalancana Karya Satya di pemerintahan Kota Palembang lebih sedikit dari pada jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang yang layak menerima Satyalancana Karya Satya tersebut.
2. Tidak sesuainya waktu pemberian Satyalanca Karya Satya di pemerintahan Kota Palembang dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 dan Surat Keputusan Sekretariat Militer Presiden/GT.00.03/12/2015.

Dengan penelitian ini di harapkan untuk para PNS terutama PNS Kota Palembang dapat mengetahui penyebab tidak di terbitkannya Penghargaan tersebut dan dapat bersabar untuk mendapatkan hasil yang maksimal, baik maksimal dalam segi pelayanan pengajuan pembuatan Satyalancana Karya Satya maupun dalam mengevisienkan pemberian penghargaan kehormatan itu.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas masalah yang saya ambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi dalam pemberian Satyalancana Karya Satya itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi tidak di terbitkannya atau diterimanya usulan penghargaan Satyalancana Karya Satya dan Waktu yang dibutuhkan dalam menerbitkan Satyalancana Karya Satya memakan waktu yang lama ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan dilapangan dari pemberian Satyalancana Karya Satya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mengetahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan tidak diterbitkannya usulan pembuatan Satyalancana Karya Satya dan Waktu yang dibutuhkan dalam menerbitkan Satyalancana Karya Satya memakan waktu yang lama.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan sumbangan bagi ilmu administrasi negara dengan penelitian judul ini "Implementasi Kebijakan Pemberian Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang".

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan sumbangan bagi PNS Kota Palembang dengan penelitian judul ini "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Studi Pemberian Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang".

Daftar Pustaka

I. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2012 “*Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*”. Negara PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustino. Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edwards III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009 “*Perencanaan, Implementasi, & Evaluasi Kebijakan atau Program*”. Pustaka Cakra: Surakarta.
- Islamy, Muh.Irfan, 2017, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Muhammad Syukur Abdullah, 1988 “*Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*,” dalam temu Kaji Posisi dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen Dalam Pembangunan, LAN, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2008, *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Parsons, Wayne, 2014, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Jakarta: Kencana.
- Raco.J.R, Dkk, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. “*Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*”. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tachjan. 2006 *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahyuni, Rochyati. 2011 “*Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*”. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Winarno, B. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2012. “*Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*”. Yogyakarta: CAPS

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

III. Jurnal

Utomo, Fitria Rachmawati. 2014 “*Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Program Relokasi PKL di Area Stadion Tambaksari Surabaya*” Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 2, Nomor 1.

Yudha, Karunia Pranata dkk. “*Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Dalam Perspektif Sustainable Evelopment (Studi Pada Himpunan Petani Pemakai Air Tirta Banjar Agung Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)*”. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal 83-90.

Rizal, Hendra Syah. 2017 “*Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kelurahan Lubuk Uding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2014-2016*”. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No.2.

Kartini, Dede Sri, dkk. 2017 “*Kapitalisme Pedesaan Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten*”. Jurnal Ilmu Pemerintahan. CosmoGov , Vol.3 No.1.